THE ANALYSIS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN TABALONG REGENCY

Muhammad Saleh ¹⁾ Ruddy Syafrudin ²⁾

^{1) 2)} Faculty Of Economic and Business, Lambung Mangkurat University, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.29, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

* fikri_alfikri17@yahoo.com

Abstract - The purpose of this research is to find out the investment opportunities in 2019-2025 which can be carried out by the government, the businessmen, and the society. The method of analysis is quantitative descriptive. The results are: (1). Based on SWOT calculation, the factors which influence the investment can be seen at the value of internal-ekstenal (IE) of 3.35 and 3.30. It means Regional Investment Development of Tabalong Regency is developing and becoming stable. (2). The areas in Tabalong Regency which have investment opportunities are the areas which have been allocated for investments, and the areas are reflected in the pattern of space. (3) . The needs of investment to achieve the growth target will be greater compared to the growth which has been achieved (4.23% per year in the last 5 years). The needs of investment to reach LTDP in 2019 is 2,267,938 million rupiahs, in 2020 is 2,385,871 million rupiahs, in 2021 is 2,509,937 million rupiahs, in 2022 is 2,640,453 million rupiahs, in 2023 is 2,777,757 million rupiahs, in 2024 is 2,922,200 million rupiahs, and at the end of 2025 it is expected to be 3,141,657 million rupiahs. The investment is expected to come from the budget of APBD Tabalong Regency, budget of South Kalimantan Province, and budget of APBN. In 2019, the investment is expected to reach 772,006 million rupiahs, and increases to 812,150 million rupiahs (in 2020), 854,382 million rupiahs (in 2021), 898,810 million rupiahs (in 2022) 945,548 million rupiahs (in 2023), 1,006,406 million rupiahs (in 2024) and 1,069,420 million rupiahs (in 2025). The investment is also expected from private parties.

Keywords : Opportunities, Investment, Economic Development

ANALISIS PELUANG PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN TABALONG

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang investasi pada periode 2019-2025 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara umum. Metode analisisnya adalah: Deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah: (1). Faktor- faktor yang mempengaruhi investasi berdasarkan hasil perhitungan SWOT, diperoleh nilai internal-ekstenal (IE) sebesar 3,35 dan 3,30 yang berarti bahwa kondisi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Tabalong berada pada posisi Pertumbuhan dan Stabilitas. (2). Peluang Investasi di Kabupaten Tabalong adalah meliputi kawasan-kawasan yang telah diperuntukan untuk investasi yang tergambar pada pola ruang, potensi yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. (3). Kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut akan lebih besar jika dibanding dengan pertumbuhan yang telah dicapai (4,23% per tahun dalam 5 tahun terakhir). Kebutuhan investasi untuk mencapai RPJP pada tahun 2019 Rp.2.267.938 juta, tahun 2020 Rp. 2.385.871 juta, tahun 2021 Rp. 2.509.937 juta, tahun 2022 Rp. 2.640.453 juta, tahun 2023 sebesar Rp. 2.777.757 juta, tahun 2024 sebesar Rp.2.922.200 juta dan pada akhir tahun 2025 diharapkan sebesar Rp.3.141.657 juta. Dari investasi tersebut diharapkan bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN. pada tahun 2019 sebesar Rp.772.006 juta terus mengalami kenaikan menjadi Rp. 812.150 juta (2020), Rp.854.382 juta (2021), Rp.898.810 juta (2022) Rp. 945.548 juta (2023), Rp.1.006.406 juta (2024) dan Rp.1.069.420 juta (2025) kemudian sisanya dari pihak swasta

Kata Kunci: Peluang, Investasi, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, memperluas

lapangan kerja, lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat diperlukan investasi baik dari pemerintah maupun pihak

swasta. Investasi dari pemerintah biasanya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mendorong (stimulus) masuknya investasi swasta sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Hubungan antara investasi dan pendapatan itu sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro, investasi itu dibahas dalam suatu topik yang sangat penting, bukan saja dalam teori Keynes, dari Post Keynesian, tetapi juga dalam teori-teori Konjungtur.

Investasi dilihat dari sudut ekonomi nasional (makro ekonomi) adalah semua pembelian/penggunaan barang modal baru yang dapat menghasilkan (*reproducible asset*) yang dilakukan dalam satu tahun. Dilihat dari sudut teori konsumsi maka investasi sebenarnya merupakan konsumsi yang ditangguhkan pada masa yang akan datang. Konsumsi yang ditangguhkan inilah tercermin sebagai penyusutan yang diperhitungkan pada setiap tahunnya.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peluang Investasi Kabupaten Tabalong 2019-2025?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Peluang Investasi Kabupaten Tabalong 2019-2025?
3. Berapa besar investasi yang harus ada di Kabupaten Tabalong jika hendak mencapai pertumbuhan jangka panjang sampai tahun 2025?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: peluang investasi 2019- 2025 yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan disemua masyarakat paling harus memiliki tiga tujuan inti yaitu: (1).Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. (2).Peningkatan standar

hidup berupa peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan. Hasil akhir yang hendak dicapai adalah perbaikan kesejahteraan material dan menumbuhkan harga diri pribadi dan bangsa. (3).Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial yaitu membebaskan mereka dari sikap ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain dari setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets (dalam Jhingan, 1975) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam jangka produk per kapita atau per pekerja, seringkali dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam factor yaitu faktor ekonomi (misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi) dan factor non ekonomi (misalnya lembaga sosial, sikap budaya, nilai, moral, kondisi politik, kelembagaan dan sebagainya).

Menurut Todaro (1993) ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (a).Akumulasi modal (*capital accumulation*) (b).Pertumbuhan penduduk (*growth in population*) dan tenaga kerja (c).Kemajuan teknologi (*technological progress*)

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mencakup pembentukan institusi- institusi baru, pembangunan industrial ternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar- pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru (Arsyad, 1999).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Menurut Sjafrizal (2008), terkait dengan proses pencarian faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terdapat empat jenis model pertumbuhan ekonomi regional yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan tentang

faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional yaitu:

1. Model Basis Ekspor
2. Model *Interregional Income*
3. Model Neo Klasik
4. Model Penyebab Berkumulatif

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Robinson Tarigan (2005) mengemukakan bahwa perencanaan dapat mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai *factor noncontrollable* yang relevan, memperkirakan factor- factor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah- langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Hubungan Investasi Dan Pendapatan

Hubungan antara investasi dan pendapatan itu sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro, investasi itu dibahas dalam suatu topik yang sangat penting, bukan saja dalam teori Keynes, dari Post Keynesian, tetapi juga dalam teori-teori Konjungtur

METODE PENELITIAN

Data

Data yang diperlukan dalam Analisis Peluang Pengembangan Investasi ini adalah Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabalong, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tabalong 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong beberapa tahun, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini bentuk data primer data sekunder. Data primer diperoleh dengan *Focus Group Discussion (FGD)* sama pimpinan/wakil pimpinan SOPD yang berhubungan dengan pengelolaan ekonomi dan investasi. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah, data tersebut antara lain

berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik atau Statistik Daerah, seperti: Kabupaten Tabalong Dalam Angka, Data Laporan dari berbagai SOPD terutama yang terkait dengan perekonomian dan investasi daerah, data Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Tabalong dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu : Form *Check List*, untuk mengumpulkan data dokumentasi dan data sekunder dari berbagai sumber.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis peluang dan faktor yang mempengaruhi investasi

Pada kajian ini analisis peluang pengembangan investasi sektoral/subsektor/komoditi yang ada pada daerah Kabupaten Tabalong dilihat dari potensinya dan peraturan (RTRW, RPJP dan RPJM). Kemudian analisis faktor yang mempengaruhinya menggunakan analisis *SWOT* yaitu: Kekuatan (*Strengths*) kelemahan (*Weaknesses*) peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

2. Analisis kebijakan

Analisis kebijakan digunakan untuk menjabarkan kebijakan - kebijakan pada masa yang lalu dan merumuskan kebijakan pembangunan pada masa mendatang.

3. Analisis Kebutuhan Investasi

Analisis Kebutuhan Investasi digunakan untuk memperkirakan kebutuhan investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target RPJP Kabupaten Tabalong 2005- 2025 dengan menggunakan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*).

HASIL PENELITIAN

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi di Kab. Tabalong

Berdasarkan urutan dari faktor strategis internal yang dimiliki dalam pengembangan investasi Daerah Kabupaten Tabalong, hasil analisis dituangkan dalam bentuk Matrik Internal

dan Eksternal (IE) serta *Matrik Strategic Position and Action Evaluation (SPACE)* (MS), sebagaimana ditunjukkan :

Tabel: 1
Faktor Strategis Internal

Faktor Strategis Internal	Bobot	Ratting	Skor
Kekuatan (S)			
• Adanya Kejelasan RPJP Kabupaten Tabalong 2005-2025	0,15	4	0,60
• Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong memiliki Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan berhubungan erat dengan masyarakat bisnis Kalsel.	0,10	4	0,40
• Iklim Investasi didukung Situasi keamanan yang kondusif	0,05	4	0,20
• Beroperasinya PLTU swasta	0,05	5	0,25
• Pengembangan biofuel dan biomassa di Tabalong	0,10	2	0,30
• Pasokan batu bara dari perusahaan pertambangan batubara	0,10	5	0,50
• Adanya kepastian hukum/ regulasi/ Perda yang pro penanaman modal.	0,05	5	0,25
Kelemahan (W)			
• Infrastruktur belum merata dan belum optimal.	0,10	2	0,20
• Keunggulan daerah masih bersifat komparatif.	0,05	2	0,10
• Ketidakmerataan investasi	0,05	3	0,15
• Tingginya biaya hidup (inflasi)	0,05	1	0,05
• Terbatas SDM yang terampil	0,05	4	0,20
• Ketergantungan terhadap migas	0,05	2	0,10
• Masih belum meratanya jaringan listrik	0,05	1	0,05
Total	1,00	IE	3,35
		MS	1,85

Sumber : Hasil Diolah, 2018

Ket: *) Rating 1 = Sangat Kecil, 2 = Kecil, 3 = Sedang, 4 = Besar, & 5=Sangat Besar

Berdasarkan urutan dari faktor strategis eksternal yang dimiliki dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tabalong, maka dapat

diringkas dan diperhitungkan melalui matriks analisis faktor eksternal strategis, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut :

Tabel: 2
Faktor Strategis Eksternal

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Ratting	Skor
Peluang (O)			
• Regulasi & kesepakatan pembangunan kawasan	0,10	3	0,30
• Regulasi percepatan Pembangunan	0,10	4	0,40
• Pembangunan yang ramah lingkungan	0,05	3	0,15
• Pengembangan energi baru dan terbarukan	0,05	3	0,15
• Program pembangunan listrik Pemerintah Pusat 35.000MW	0,10	4	0,60
• Pengembangan teknologi pemanfaatan batubara (CBM dll) dan bahan bakar nabati	0,10	5	0,50
Ancaman (T)			
• Degradasi lingkungan	0,10	2	0,20
• Bencana alam (banjir)	0,10	2	0,20
• Meningkatnya daya saing dari luar daerah Tabalong	0,05	3	0,15
• Bencana kebakaran lahan/ hutan	0,05	1	0,05
• Berkurangnya cadangan migas	0,10	3	0,30
• Isu polusi dan pemanasan global	0,10	3	0,30
Total	1,00	IE	3,30
		MS	1,10

Sumber : Hasil Diolah, 2018

Ket: *) Rating 1 = Sangat Kecil, 2 = Kecil, 3 =
Sedang, 4 = Besar, & 5= Sangat Besar .

Berdasarkan hasil perhitungan SWOT, maka diperoleh nilai internal-eksternal (IE) sebesar **3,35** dan **3,30** yang berarti bahwa kondisi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Tabalong berada pada posisi **Pertumbuhan dan Stabilitas**. Artinya secara internal faktor-faktor yang memberikan sinyal positif atau merupakan penanaman modal daerah secara akumulasi relatif lebih besar. Demikian halnya dengan faktor-faktor eksternal yang mendukung terjadinya kegiatan investasi di Kabupaten Tabalong juga relatif lebih besar atau kedua faktor internal dan eksternal di atas nilai rata-rata.

Berdasarkan hasil analisis dengan *Matrik Space (MS)* diperoleh nilai sebesar **1,85** untuk sumbu X dan **1,10** untuk sumbu Y kondisi Pengembangan investasi di Kabupaten Tabalong berada pada posisi **Pertumbuhan/Agresif**. Artinya faktor-faktor yang memberikan sinyal atau menunjukkan kekuatan kondisi investasi daerah menunjukkan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang melemahkan. Demikian halnya dengan faktor-faktor yang memberikan peluang untuk berkembangnya investasi di Kabupaten Tabalong juga menunjukkan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan faktor yang mengancam keberlangsungan investasi. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Tabalong pada posisi kuadran 1 dan punya kemampuan untuk menerapkan **strategi pertumbuhan (growth strategy)**. Dengan demikian terdapat konsistensi antara dua pendekatan baik menggunakan Matrik Internal dan Eksternal (MIE) maupun Matrik Space (MS) dan keduanya mendukung adanya strategi pertumbuhan dan stabilitas serta agresif.

Analisis Peluang Investasi Di Kabupaten Tabalong

Peluang investasi di Kabupaten Tabalong adalah meliputi kawasan- kawasan yang telah diperuntukan untuk penanaman modal adalah: Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong yang tergambar pada pola ruang, potensi yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya.

Kawasan budidaya tersebut terdiri atas :

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

1. Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 53.983 hektar, yang berada di :
 - a. Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 1.124 hektar;
 - b. Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 44.793 hektar; dan
 - c. Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 8.066 hektar.
2. Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 96.247 hektar, yang berada di:
 - a. Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 4.390 hektar;
 - b. Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 6.810 hektar;
 - c. Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 25.060 hektar;
 - d. Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 47.847 hektar;
 - e. Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 5.470 hektar; dan
 - f. Kecamatan Upau seluas kurang lebih 6.670 hektar.
3. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 2.397 hektar, yang berada di :
 - a. Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 2.332 hektar;
 - b. Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 33 hektar; dan
 - c. Kecamatan Kelua seluas kurang lebih 32 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

1. Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas kurang lebih 18.673 hektar, yang berada di :
 - a. Kecamatan Banua Lawas seluas kurang lebih 3.571 hektar;
 - b. Kecamatan Kelua seluas kurang lebih 1.782 hektar;
 - c. Kecamatan Muara Harus seluas kurang lebih 919 hektar;
 - d. Kecamatan Pugaan seluas kurang lebih 1.521 hektar;
 - e. Kecamatan Tanta seluas kurang lebih 1.004 hektar;
 - f. Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 4.919 hektar;

- g. Kecamatan Murung Pudak kurang lebih seluas 340 hektar;
- h. Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 1.103 hektar;
- i. Kecamatan Upau seluas 416 (empat ratus enam belas) hektar;
- j. Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 1.334 hektar;
- k. Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 1.725 hektar;
- l. Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 40 hektar.
- 2. kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura seluas kurang lebih 3.914 hektar, yang berada di :
 - a. Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 385 hektar;
 - b. Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 3.529 hektar.

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- 1. Kawasan pengembangan perkebunan besar swasta kelapa sawit dan karet seluas kurang lebih 30.745 Ha yang terdapat di Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Haruai, Banua Lawas, Pugaan, Muara Harus dan Kelua; dan
- 2. Kawasan pengembangan perkebunan rakyat berupa tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi dan komoditas lainnya seluas kurang lebih 47.534 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan peternakan meliputi :

- 1. Kawasan pusat pembibitan dan pengembangan ternak sapi di Desa Hayup, Surian dan Catur Karya Kecamatan Haruai; Desa Masingai I dan Masingan II Kecamatan Upau; Desa Garagata, Jaro, Nalui, Namun dan Muang Kecamatan Jaro; Desa Argomulyo dan Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara; Desa Kambitin Kecamatan Tanjung;
- 2. Kawasan pembibitan dan pengembangan unggas di Kecamatan Tanta, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Banua Lawas; dan
- 3. Kawasan pengembangan ternak sedang (kambing) di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :

- 1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Kelua, Banua Lawas, Muara Harus dan Tanta;
- 2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:
 - a. Pembenihan dan perbesaran ikan di Desa Kambitin dan Kambitin Raya Kecamatan Tanjung dan Desa Jaro Kecamatan Jaro;
 - b. Pengembangan usaha perbesaran ikan di Kecamatan Kelua, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas, Jaro dan Tanjung;
 - c. Pengembangan minapadi, yang meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai dan Upau.

Kawasan peruntukan industri meliputi :

- 1. Kawasan peruntukan industri besar, sedang dan dikembangkan dalam bentuk zona industri, meliputi :
 - a. kawasan industri Murung Pudak seluas kurang lebih 841 hektar di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan prioritas pengembangan untuk industri agro;
 - b. kawasan industri Seradang seluas kurang lebih 1.017 hektar yang sebagian terletak di Desa Seradang Kecamatan Haruai dan sebagian terletak di Desa Kaong Kecamatan Upau, untuk industri besar berbahan baku sumberdaya mineral logam dan non logam; dan
 - c. kawasan industri sawit terletak di masing-masing lokasi kebun sawit khusus untuk pembuatan CPO.
- 2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan, dikembangkan di seluruh kelurahan dan desa yang berpotensi.

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :

- 1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas : Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai,

dan Pemukiman Suku Dayak di Kecamatan Tanta;

2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas : air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya;
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas : Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalng jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro.

Kawasan peruntukan permukiman, meliputi :

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 2.784 hektar yang meliputi seluruh kelurahan dan desa yang berada di wilayah PKL; dan
2. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.250 hektar yang meliputi PPK dan PPL serta seluruh desa dan anak desa di setiap kecamatan.

Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara, berupa :
 - a. Batubara terdapat di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Tanta, Upau, Haruai, Bintang Ara, Muara Uya, dan Jaro;
 - b. Logam berupa emas terdapat di Kecamatan Jaro dan Murung Pudak;
 - c. Biji besi yang terdapat di Kecamatan Jaro dan Upau;
2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan meliputi :

- a. wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 6.282 hektar di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 0, hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.484 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.885 hektar, di Kecamatan Tanta seluas kurang lebih 3.844 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 765 hektar;

- b. wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 1.645 hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 10.581 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 689 hektar di Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 2.688 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.398 hektar, dan

- c. wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 88 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 94 hektar.

3. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang berada di dalam kawasan peruntukan kehutanan meliputi :

- a. wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 4.621 hektar, Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.129 hektar di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 8.193 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.178 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.896 hektar, di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 177 hektar;

- b. wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 12.308 hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 2.159 hektar, di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 1.839 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 27.223 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 1.005 hektar di

- Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 13 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.115 hektar, dan
- c. wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.815 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.186 hektar.
 4. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Murung Pudak dan Tepian Timur Kecamatan Murung Pudak; Tanjung dan Kambitin Kecamatan Tanjung; Dahor, Warukin dan Tanta Kecamatan Tanta; Surian Kecamatan Haruai; Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas serta Kecamatan Pugaan, dan ditetapkan sebagai objek vital nasional.
 5. Kawasan peruntukan pertambangan non logam, berupa marmer, batu gamping, andesit, lempung, batu rijang, pasir kuarsa, pasir berangkal, dan kerikil terdapat di Kecamatan Muara Uya, Jaro, Upau, Bintang Ara, Haruai, Murung Pudak, Tanjung, dan Kelua.
 6. Kawasan peruntukan pertambangan non logam menurut izin usaha pertambangan yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 18 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 3 hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 4 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan, dan di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 331 hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan.
 7. Kawasan peruntukan pertambangan non logam berupa pasir kuarsa terdapat di Kecamatan Banua Lawas seluas 212 hektar.

Proyeksi Kebutuhan Unvestasi Dan Manfaat Yang Didapat

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong pada periode 2011-2017 (7tahun terakhir) mencapai rata-rata 4,32% per tahun. Perkembangan tingkat pertumbuhan

ekonomi ini searah dengan naik turunnya belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal (investasi) APBD Kabupaten Tabalong ada berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong.

Jika pemerintah daerah ingin mempertahankan pertumbuhan sebesar 4,32% per tahun dengan asumsi tingkat inflasi rata-rata 1,38% (inflasi 7 tahun terakhir) per tahun dan dengan ICOR sebesar 3,04 maka diperlukan investasi yang cukup besar baik dari pemerintah maupun swasta. Besarnya investasi yang diperlukan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.278.717 juta dan setiap tahunnya harus mengalami kenaikan menjadi Rp.2.408.604 juta (2020), Rp. 2.545.894 juta (2021) dan Rp. 3.177.901 juta (2025). Dari total investasi diharapkan bersumber dari Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemprow, dan Pemerintah Pusat. Investasi dari pihak swasta ini bisa saja bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong.

Jika pemeritah daerah melakukan kebijakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tabalong, Kebutuhan investasi pada tahun 2019 Rp. 2.267.938 juta, tahun 2020 Rp. 2.385.871 juta, tahun 2021 Rp. 2.509.937 juta, tahun 2022 Rp. 2.640.453juta, tahun 2023 sebesar Rp. 2.777.757 juta, tahun 2024 sebesar Rp.2.922.200 juta dan pada akhir tahun 2025 diharapkan sebesar Rp. 3.141.657 juta.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memudahkan investor dalam menanamkan modalnya di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian

daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi investasi berdasarkan hasil perhitungan SWOT, diperoleh nilai internal-eksternal (IE) sebesar 3,35 dan 3,30 yang berarti bahwa kondisi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Tabalong berada pada posisi Pertumbuhan dan Stabilitas. Artinya memberikan sinyal positif untuk pengembangan investasi daerah secara akumulasi relatif lebih besar.
3. Peluang investasi di Kabupaten Tabalong adalah meliputi kawasan- kawasan yang telah diperuntukan untuk investasi adalah: Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong yang tergambar pada pola ruang, potensi yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan peruntukan lainnya yang tersebar diseluruh Kabupaten Tabalong.
4. Manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan akan didapat jika potensi ekonomi daerah Kabupaten Tabalong dapat dikembangkan dengan baik. Pembangunan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik jika sesuai dengan kawasan- kawasan yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi lebih produktif (sesuai RTRW). Pengembangan

potensi kawasan ini akan memerlukan investasi yang cukup besar sebagai pendorongnya.

5. Jika Pemerintah Daerah melakukan kebijakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tabalong, maka kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut akan lebih besar jika dibanding dengan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai (4,23% per tahun). Kebutuhan investasi tersebut diharapkan bersumber dari swasta dan pemerintah. Sumber investasi pemerintah bisa dari dana APBD Kabupaten Tabalong, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dan perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
2. Diharapkan pengembangan investasi disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tabalong dan diharuskan ramah lingkungan.
3. Diharapkan Kabupaten Tabalong harus lebih terarah dalam kebijakan investasi didaerahnya dan harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Tabalong.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, ., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah.

- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

- Boediono. (1985). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Bryant, Coralie, dan White Louise G. (1987), Manajemen Pembangunan, Jakarta LP3ES.
- Jhingan M.L. (2012). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad, Kuncoro. (2010). Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Sadono Sukirno. (2006). Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Soediyono (1983) Ekonomi Makro I Yogyakarta, Liberty
- Tarigan, Robinson (2005) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta. PT. Gunung Agung
- Todaro, Michael P. Dan Smith, Stephen. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Munandar, Haris [Penerjemah], Jakarta: Erlangga.
- Soleh, Chabib dan Rocmansjah, Heru. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta : Fokusmedia, 2010.
- Subdit Data Keuangan Daerah. Dit. EPIKD, *Profil ABD TA 2012*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012